



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i2.962>

Vol. 7 No. 2 (2024)
pp. 488-500

Research Article

Peran Kebijakan Moneter Bank Sentral Dalam Mengendalikan Inflasi Dan Nilai Tukar

Jajang Herawan¹, Yadi Janwari², Sofyan Al-Hakim³

1. STAI Muhammadiyah Garut; herawanlaw@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; yadijanwari@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; sofyanalhakim@uinsgd.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : November 30, 2023

Revised : February 14, 2024

Accepted : March 15, 2024

Available online : April 22, 2024

How to Cite: Jajang Herawan, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "The Role of Central Bank Monetary Policy in Controlling Inflation and Exchange Rates", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 488-500. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.962.

The Role of Central Bank Monetary Policy in Controlling Inflation and Exchange Rates

Abstract. This research explains the role of the central bank as a monetary policy regulator that has the ability to control inflation and the exchange rate. This is proven by the circulation of currency in the economy which reflects changes in the amount of currency in circulation, interest rates, credit, exchange rates, and many other economic and financial variables. The method used in this article uses a qualitative descriptive approach. Descriptive refers to the researcher's efforts to systematically and accurately describe those who study or criticize literature, whether from books, journals or other documents, based on several opinions based on a number of research results from journalists or document critics. The results of the review show that a significant difference in Islamic monetary policy is that Islamic economics does not provide guarantees regarding nominal values, profit margins, or

interest rates. Therefore, monetary policy automatically becomes sharia monetary policy, that is, it does not use interest rates as its operational target. The tool used is sharia law.

Keywords: Monetary Policy, Inflation, Exchange Rate, Central Bank

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan peran bank sentral sebagai pengatur kebijakan moneter yang mempunyai kemampuan mengendalikan inflasi dan nilai tukar. Hal ini dibuktikan dengan peredaran mata uang dalam perekonomian yang mencerminkan perubahan jumlah mata uang yang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar, serta banyak variabel ekonomi dan keuangan lainnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif mengacu pada upaya peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat pihak-pihak yang mengkaji atau mengkritisi literatur, baik dari buku, jurnal, atau dokumen lainnya, berdasarkan beberapa pendapat atas sejumlah hasil penelitian para jurnalis atau kritikus dokumen. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dalam kebijakan moneter Islam adalah ekonomi Islam tidak memberikan jaminan mengenai nilai nominal, margin keuntungan, atau suku bunga. Oleh karena itu, kebijakan moneter secara otomatis menjadi kebijakan moneter syariat, yaitu tidak menjadikan suku bunga sebagai sasaran operasionalnya. Alat yang digunakan adalah hukum syariat.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Inflasi, Nilai Tukar, Bank Sentral

PENDAHULUAN

Naik turunnya perekonomian atau siklus perekonomian suatu negara dapat berkembang pesat dan melambat dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pemerintah atau otoritas moneter mengambil langkah-langkah kebijakan untuk memengaruhi keberlangsungan pembangunan ekonomi melalui manajemen penawaran dan permintaan. Dengan cara ini, perekonomian dapat bergerak menuju kestabilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Utami, 2019).

Pasar keuangan global, yang sudah dipenuhi ketidakpastian, mulai melemah seiring dengan komunikasi The Fed yang transparan dan konsisten mengenai kebijakannya yang masih akomodatif. Perkembangan ini semakin dibayangi oleh fakta bahwa inflasi AS melebihi ekspektasi pasar. Pada triwulan II tahun 2021, pertumbuhan ekonomi dalam negeri membaik sesuai ekspektasi dan perekonomian kembali terlihat dengan penurunan yang lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2020 sebesar 2,19% (dibandingkan periode yang sama tahun lalu) dan 0,74% (dibandingkan periode yang sama tahun lalu) (Noviyanto, 2020). Sementara itu, pandemi Covid-19 di Indonesia yang membuat pergerakan masyarakat terbatas berdampak pada penurunan konsumsi rumah tangga. Nilai tukar rupiah terkendali didukung oleh langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia. Dibandingkan dengan level April 2021, nilai tukar rupee pada 24 Mei 2021 menguat sebesar 0,63% dengan rata-rata 1,42 (Noviyanto, 2021).

Namun, inflasi tetap rendah sejalan dengan pasokan yang memadai di tengah permintaan musiman yang meningkat selama bulan Ramadhan. Pada April 2021, tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat sebesar 0,13% (*month-to-month*) sehingga tingkat inflasi IHK sampai April 2021 tercatat sebesar 0,58% (*year-to-date*). Secara tahunan, inflasi IHK masih tercatat rendah yaitu sebesar 1,42% (*year-on-year*) meskipun sedikit meningkat dibandingkan bulan lalu sebesar 1,37% (*year-on-*

year). (Noviyanto, 2021).

Hasil empiris (Fitria, 2016) menjelaskan bahwa di Indonesia kesenjangan sosial ekonomi semakin lebar seiring dengan meningkatnya inflasi. Hal ini disebabkan oleh distribusi inflasi yang tidak merata di banyak daerah di Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tertinggi di Indonesia bertujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Karena itu kebijakan moneter dan fiskal sejatinya mempertimbangkan aspek morality dan etika. Dalam Islam sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan yang dikutip Yadi Janwari, menegaskan bahwa system ekonomi akan kuat dan kokoh manakal dikembangkan dengan komitmen dan tunduk kepada morality dan etika (Yadi Janwari, 2016 :311).

Penggunaan kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter sendiri merupakan suatu rencana dan tindakan terkoordinasi yang diambil oleh otoritas moneter untuk menjaga keseimbangan mata uang, menstabilkan nilai mata uang, mendorong kelancaran pembangunan dan produksi, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Yadi Janwari, 2016 :315).

Kebijakan moneter merupakan salah satu cara untuk mengendalikan inflasi. Perkembangan inflasi dipengaruhi oleh inflasi inti yang stabil di tengah membaiknya permintaan domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia untuk menjaga ekspektasi inflasi pada kisaran target.

Pada dasarnya, inflasi itu buruk. Dampak negatif inflasi bermacam-macam. Selain mendistorsi harga, inflasi dapat mengikis tabungan, menurunkan investasi, merangsang pelarian modal, menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak rencana perekonomian yang telah ditetapkan, dan yang lebih parah lagi dapat menimbulkan "kerusakan" sosial dan politik (Lestari & Utami, 2019). Pemerintah di dunia cenderung menganggap inflasi sebagai sebuah "epidemi" dan berusaha mengatasinya dengan menerapkan kebijakan moneter serta fiskal yang konservatif dan berkelanjutan. (Lestari dan Utami, 2019).

Berbeda dengan Arianto (2020) yang berpendapat bahwa inflasi selalu menjadi isu yang menarik atensi pemerintah dan para ekonom, nyatanya inflasi tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Inflasi dapat berdampak positif jika pemerintah menstabilisasikan laju inflasi dengan menerapkan kebijakan moneter dan fiskal. Dalam ilmu ekonomi Islam, pengendalian inflasi tidak dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui alat suku bunga, melainkan dengan tidak melakukan penambahan uang. Jika ingin menambah atau mencetak uang, harus diikuti penambahan barang dan jasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa tercatat sebesar 3,25% pada bulan Januari 2018, turun menjadi 2,82% pada bulan Januari 2019, 2,57% pada bulan Februari 2019, dan 3,18% pada bulan Februari 2019. Sasaran atau sasaran inflasi adalah tingkat inflasi yang harus dicapai Bank Indonesia melalui koordinasi dengan pemerintah. Pemerintah menetapkan sasaran inflasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia. Sasaran inflasi tiga tahun ke depan ditetapkan melalui peraturan Kementerian Keuangan. Bank Indonesia dan pemerintah tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan melalui koordinasi kebijakan yang sejalan dengan sasaran inflasi (Kezia dkk., 2021).

Pengalaman yang terjadi selama ini mendorong pemerintah mengandalkan target antara (*intermediate targets*) seperti jumlah pengendalian uang beredar dan nilai tukar untuk mengendalikan kebijakan moneter. Selama beberapa dekade terakhir, tujuh negara industri maju (*industrialized developed countries*) atau G-7 (saat ini delapan) dan beberapa negara dengan pasar berkembang pesat (*emerging market countries*) banyak mengalami kemunduran karena mempertahankan “tradisi lama” yang disebutkan di atas dengan menggunakan target antara dan mulai fokus pada tingkat inflasi itu sendiri. Pendekatan baru untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter disebut target inflasi (*inflation targeting*). Dalam pendekatan ini, otoritas moneter perlu mengumumkan secara eksplisit target inflasi kepada masyarakat dan menginstruksikan otoritas moneter untuk mencapai target inflasi dalam waktu yang telah ditentukan (*agreed time horizon*). (Lestari dan Utami, 2019).

Tugas kebijakan moneter pada umumnya lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan tugas di negara maju. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. (Putra, 2015). Tugas menciptakan jumlah uang beredar yang memadai agar pertumbuhannya selalu sejalan dengan proses pembangunan memerlukan disiplin yang ketat dari otoritas moneter dan pemerintah. Kurangnya modal dan terbatasnya pendapatan pemerintah cenderung menciptakan insentif yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan pinjaman berlebihan dari bank sentral. Jika hal ini dilakukan, jumlah uang tunai akan bertambah lebih cepat dari yang diperlukan. Kedua, bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan hati-hati memantau perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi aktivitas sektor luar negeri (ekspor dan impor). Aktivitas di sektor ini dapat dengan mudah menyebabkan inflasi dalam negeri karena harga bahan baku yang diekspor selalu berfluktuasi naik dan turun. Oleh karena itu, pendapatan dari kegiatan ekspor selalu mengalami perubahan yang tidak teratur. (Putra, 2015).

Sherly Yulia dan Tina Ajeng Wijiant berpendapat bahwa kebijakan moneter dapat dijelaskan sebagai upaya mengendalikan keadaan perekonomian dengan mengatur jumlah uang beredar untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Otoritas moneter adalah suatu bentuk otoritas yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan memiliki hak menetapkan tingkat suku bunga guna menentukan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara. Di Indonesia, Bank Indonesia dijadikan sebagai bank sentral karena merupakan lembaga nasional yang independen. Tujuan Bank Indonesia selalu berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas sistem keuangan merupakan kondisi di mana sistem mekanisme mampu mengalokasikan sumber daya keuangan secara rasional dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi guna mencegah terganggunya aktivitas sektor riil dan sistem keuangan.

Kebijakan moneter ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter Indonesia. Untuk menjaga kondisi perekonomian tetap tumbuh dan kondusif, BI mengeluarkan kebijakan moneter yang berdampak pada sektor keuangan, khususnya sektor perbankan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan makroekonomi yang berkaitan langsung dengan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter menggunakan variabel seperti jumlah uang beredar (*money supply*) dan tingkat suku

bunga (*interest rate*) untuk memengaruhi permintaan agregat dan mengendalikan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Dengan kebijakan moneter pemerintah, dalam hal ini BI juga dapat mengendalikan jumlah uang beredar, kredit, dan operasional perbankan. (Semuel, 2003).

BI berperan sebagai otoritas moneter di Indonesia. Dalam kebijakan moneter, efektivitas kebijakan moneter bergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dan variabel ekonomi utama seperti *output* (pertumbuhan ekonomi), tingkat suku bunga, dan inflasi. Berbagai hasil empiris yang menarik mengenai hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, dan *output* dapat ditemukan dalam banyak literatur. Hasil empiris ini secara umum mengarah pada kesimpulan bahwa hubungan antara pertumbuhan uang beredar dengan inflasi adalah sempurna dalam jangka panjang, sedangkan hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi dengan pertumbuhan *output* riil kemungkinan besar mendekati nol. Sementara itu, tingkat suku bunga merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh otoritas moneter dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global. (Utami, 2019). (Hidayat dan Sulasmiyati, n.d.), lemahnya daya saing barang dan jasa pada dasarnya disebabkan oleh tingginya inflasi yang berdampak pada rendahnya keuntungan perusahaan dan terhambatnya investasi. Menurut Letarisky (dalam Hidayat dan Sulasmiyati, n.d.), inflasi yang semakin tinggi akan menyebabkan menurunnya jumlah penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif mengacu pada upaya peneliti untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat pihak-pihak yang mengkaji atau mengkritisi literatur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* dengan menelaah sejumlah artikel, buku, jurnal, atau dokumen lainnya, serta membuka web untuk memperoleh data, teori, dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan data tersebut, dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini serta ditemukan suatu kesimpulan yang objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, penulis memperoleh informasi mengenai kebijakan moneter, inflasi dan suku bunga sebagai berikut:

Konsep Bank Sentral

Bank sentral adalah suatu lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dengan karakteristik dan kekhususannya. Pembahasan mengenai bank sentral tidak dapat dipisahkan dari kajian interdisipliner ilmu hukum dan ekonomi. Hal ini karena kebijakan bank sentral didasarkan pada mandat hukum dan dirancang untuk mengelola dinamika perekonomian guna menghindari fluktuasi ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas. Tujuan bank sentral adalah menerapkan dan menetapkan kebijakan *countercyclical*, yaitu suatu upaya proaktif untuk mengatasi pergerakan siklus ekonomi, baik dalam kondisi pertumbuhan pesat (*boom*) maupun melambat

(*busts*). (Isyunanda, n.d.).

Keberadaan bank sentral muncul ketika timbul keraguan terhadap teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith (*The Invisible Hands*). Adam Smith percaya bahwa kapitalisme, yang mencerminkan kepentingan bersama pelaku pasar, dapat menjadi sistem disiplin pasar. (Isyunanda, 2020).

Bank sentral merupakan lembaga nasional yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran sah suatu negara. Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan Bank Indonesia mempunyai lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan adalah sebagai berikut:

Pertama, Bank Indonesia berperan menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. *Kedua*, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. (Putra, 2015).

Esensi Kebijakan Moneter dalam Pembangunan Bank sentral adalah lembaga yang melakukan pengendalian moneter melalui pelaksanaan serangkaian kebijakan moneter. Kebijakan moneter mengacu pada kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter bertujuan untuk memantau dan memengaruhi stabilitas, aktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang dirumuskan oleh bank sentral berupa kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif (Putra, 2015).

Kebijakan moneter secara umum menempatkan dua indikator penting kebijakan moneter, yaitu suku bunga dan uang beredar. Namun, dalam kehidupan perekonomian sehari-hari, yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat hanyalah indikator suku bunga. Oleh karena itu, secara umum masyarakat juga dapat melihat dan merasakan beberapa hal penting yang menjadi indikator stabilitas moneter. Sebagai tolok ukur stabilitas moneter, hal ini mencakup: a) laju tingkat inflasi yang cukup rendah, b) tingkat suku bunga yang wajar, c) nilai tukar rupiah yang realistis, d) ekspektasi masyarakat terhadap moneter.

Keempat tolok ukur ini dapat dilihat setiap hari dan pengaruhnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Perkembangan berbagai tolok ukur stabilitas moneter secara langsung maupun tidak langsung berkaitan erat dengan perkembangan industri perbankan yang sehat (Putra, 2015).

Kebijakan Moneter dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengatur jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang berlangsung, selain perlunya menata sektor riil, juga penting untuk meluruskan beberapa kekeliruan pandangan seputar masalah uang. Jika dicermati, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lain di dunia sebenarnya disebabkan oleh dua hal, yang keduanya berkaitan dengan permasalahan uang. (Grant dan Parker, 2009).

- a. *Pertama*, persoalan mata uang. Nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), bukan dengan mata uang negara itu sendiri, sehingga nilainya tidak pernah stabil karena jika nilai

mata uang tertentu berfluktuasi pasti akan memengaruhi stabilitas mata uang tersebut.

- b. *Kedua*, kenyataan bahwa uang tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan (di bursa valuta asing) dan keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba diambil dari setiap transaksi pinjaman atau penyimpanan uang.

Persoalan kedua relatif dapat diselesaikan jika semua bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dilarang. Lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal sah yang beroperasi untuk menggantikan bank-bank konvensional di negara ini. Dengan melarang semua transaksi yang bersifat riba, berarti telah menghilangkan faktor utama penyebab liabilitas moneter.

Marzuki (2020) menyatakan bahwa kebijakan moneter dalam hukum ekonomi Islam merupakan salah satu ajaran Islam yang paling penting untuk menegakkan dan membatasi eksploitasi dalam transaksi bisnis, yaitu melarang segala bentuk upaya “memperkaya diri secara tidak sah (*akl amwal al-nas bi al-batil*)”. Al-Quran sebagai pedoman bertugas memerintahkan kaum muslimin untuk tidak saling memperebutkan harta secara batil atau dengan cara yang tidak benar, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188).

Ayat di atas menekankan bahwa kegiatan perekonomian harus mengikuti jalur yang telah ditentukan. Perspektif Islam terhadap uang dan kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga keadilan, perdamaian, dan keharmonisan sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini juga akan menjawab kompleksitas konsep ekonomi konvensional yang menurutnya memiliki sistem ekonomi yang menguntungkan, adil, dan terjamin, yaitu sistem ekonomi Islam.

Inflasi

Inflasi merupakan peristiwa moneter yang menyebabkan nilai mata uang suatu barang tertentu menurun. Peristiwa ini mengganggu fungsi uang, mendistorsi harga, merusak *output*, melemahkan efisiensi dan investasi produktif, serta menyebabkan ketidakadilan sosial. (Mulyani, 2020). Tingkat inflasi, atau presentasi kenaikan harga pada tahun tertentu, sering kali digunakan untuk mengukur sejauh mana permasalahan ekonomi yang dihadapi. Pada saat perang atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, peningkatan tersebut dikenal sebagai hiperinflasi (Sukirno, dalam Kezia dkk., 2021).

Kuantitas inflasi yang terlalu tinggi akan berdampak pada masyarakat berupa menurunnya pendapatan riil. Contoh kasus, ketika kita mempunyai Rp10.000,00 untuk membeli mi ayam. Sebelum terjadinya inflasi, sepori mi ayam berharga Rp5.000,00. Dengan begitu, uang Rp10.000,00 dapat membeli dua porsi mi ayam. Namun, setelah sekian lama mengalami inflasi tinggi, harga mi ayam naik hingga Rp10.000,00 per porsi. Dengan begitu, uang Rp10.000,00 akan habis hanya dengan membeli sepori mi ayam. Selain itu, dampak lain yang tidak terkendali adalah ketidakmampuan pelaku ekonomi dalam memperkirakan kondisi perekonomian di masa depan. Misalnya, ketika harga bahan baku tiba-tiba naik, kita tidak bisa memastikan berapa keuntungan yang bisa kita peroleh dari penjualan mi ayam (Mulyani, 2020).

Beberapa negara industri maju memilih target inflasi sebagai kerangka kebijakan moneter (*monetary policy framework*) dengan alasan sebagai berikut: *Pertama*, otoritas moneter negara-negara tersebut memutuskan untuk menjaga stabilitas harga, yaitu tingkat inflasi yang rendah dan stabil, sebagai tujuan utama mereka sehingga kebijakan moneter dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, pengalaman praktis saat ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter jangka pendek yang ditujukan untuk mencapai tujuan lain (seperti penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan *output* nasional) dapat bertentangan dengan upaya menjaga stabilitas harga (*inflationary biased*). Penargetan inflasi pada dasarnya membantu otoritas moneter memecahkan masalah ini dengan menjadikan inflasi—dan bukan lapangan kerja (*employment*), *output*, atau hal lainnya—sebagai tujuan utama kebijakan moneter.

Penyebab Inflasi

Secara konvensional, terdapat dua jenis penyebab inflasi, yaitu: inflasi tarikan penawaran (*demand pull inflation*) dan inflasi desakan biaya (*cost-push inflation*). Sementara itu, menurut Islam, penyebab terjadinya inflasi ada tiga, yaitu: 1) inflasi alami (*natural inflation*), yaitu keadaan di mana masyarakat tidak memiliki kendali untuk menekan inflasi karena inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah; 2) inflasi kesalahan manusia (*human error inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri; 3) Pasar emosional (*emotional market*), yaitu tingginya permintaan terhadap barang dan jasa karena isu, kegiatan keagamaan, atau berkaitan dengan budaya dan perilaku.

Konsekuensi inflasi memperburuk distribusi pendapatan dan mengganggu stabilitas perekonomian. Menurut (Parakkasi, 2016) dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi dapat menimbulkan kekacauan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja (konsumtif), dan menggiring masyarakat untuk berinvestasi pada sektor-sektor non-produktif. Oleh karena itu, pencegahan inflasi melalui kebijakan moneter, fiskal, dan *output* yang dilaksanakan pemerintah harus dibarengi dengan perubahan perilaku moral masyarakat.

Catatan sejarah menunjukkan situasi moneter yang didominasi oleh negara. Pada masa Abbasiyah, banyak pemimpin atau putra mahkota yang memperlakukan dinar dan dirham sebagai perhiasan dengan meleburkannya. Ketika mendapatkan istri cantik, perhiasan ini akan diberikan kepada mereka. Dengan cara ini, dinar dan

dirham tidak dapat menjadi alat tukar untuk mendorong perekonomian. Hal ini disebut kesalahan manusia (*human error*) dan inilah realitas inflasi dalam perekonomian Islam.

Suku Bunga

Investor di seluruh dunia sedang menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, the Fed, untuk memutuskan tingkat suku bunga AS. Tidak jarang dijumpai, hampir di seluruh dunia, indeks saham yang mengalami penurunan sesaat sebelum the Fed mengumumkan tingkat suku bunga, mengingat suku bunga merupakan acuan fundamental dalam berinvestasi (Muis, 2016).

Suku bunga perbankan yang tinggi mendorong investor untuk menginvestasikan dananya melalui instrumen perbankan seperti tabungan dan deposito dibandingkan memilih instrumen investasi seperti saham dan obligasi. Suku bunga Indonesia mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan BI. Suku bunga bank digunakan untuk mengendalikan perekonomian suatu negara dan diatur serta ditetapkan oleh pemerintah guna menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara (Utami, 2019).

Hubungan Kebijakan Moneter, Inflasi, dan Nilai Tukar dalam Peran Bank Sentral

Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, salah satu faktor yang sangat penting dan komplementer dalam efektivitas kebijakan moneter adalah pemahaman tentang pembentukan ekspektasi inflasi oleh para pelaku ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhi inflasi (Marimin dan Romdhoni, 2017). Dengan memahami kedua hal tersebut, dapat dijadikan sebagai dasar untuk:

- i. Mengendalikan inflasi, khususnya melalui kebijakan moneter
- ii. Menentukan target inflasi yang diharapkan pemerintah

Tolok ukur stabilitas moneter, di antaranya:

- Laju Inflasi
- Suku Bunga
- Nilai Tukar Mata Uang
- Ekspektasi Masyarakat.

Melihat parameter stabilitas moneter dari sudut pandang inflasi, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terdorong untuk melakukan kebijakan dengan menaikkan suku bunga agar minat menabung masyarakat tinggi sehingga situasi sektor stabil dan efek kenaikan harga yang tinggi tidak terjadi. Harga yang tinggi menyebabkan rendahnya daya beli dan berkurangnya vitalitas sektor riil sehingga suku bunga perlu dinaikkan untuk mencapai stabilitas. Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia juga perlu melakukan stabilisasi perubahan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri dan faktor penarik luar negeri. Ada kalanya, nilai tukar rupiah yang rendah dapat menarik daya beli asing dan berdampak positif terhadap pembangunan (Putra, 2015).

Jenis-jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter diklasifikasikan menjadi kebijakan kuantitatif dan kebijakan kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Peningkatan jumlah uang beredar akan menurunkan suku bunga. Hal ini akan mendorong terjadinya perkembangan ekonomi yang menyebabkan tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan mengurangi pengangguran. Selain peningkatan jumlah uang beredar, pengeluaran agregat juga perlu dikurangi agar keseimbangan antara pengeluaran dalam ekonomi dengan penawaran barang dapat terjadi (Rusdi Rustandi, 2019).

a. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen berikut:

- 1) Politik Diskonto (*Discount Policy*). Politik diskon mengatur jumlah uang yang beredar dengan memanipulasi suku bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami masalah likuiditas sehingga harus meminjam dari bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan tingkat suku bunga bank sentral, dan sebaliknya menaikkan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
- 2) Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement Ratio*). Giro wajib minimum mengatur jumlah uang beredar dengan memanipulasi jumlah dana cadangan bank yang harus disimpan pada bank sentral. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan inflasi, bank sentral akan menaikkan rasio giro wajib minimum. Akibatnya, bank umum mengalokasikan lebih sedikit dana kepada masyarakat dan menurunkan tingkat inflasi (Rusdi Rustandi, 2019).

b. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter kualitatif adalah kebijakan bank sentral yang dirancang untuk mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank komersial. Tujuan utama kebijakan ini bukan untuk mengawasi perkembangan jumlah uang beredar, tetapi untuk memengaruhi jenis pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang diinginkan. Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih. Bank sentral memberikan pengawasan agar pinjaman dan investasi dilakukan sesuai dengan peraturan dan keinginan pemerintah. Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan mengawasi pola pemberian pinjaman dan investasi bank.
- 2) Imbauan Moral (*Moral Suasion*). Imbauan moral bank sentral adalah mendorong bank untuk menyesuaikan alokasi modalnya. Dengan cara ini, situasi yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

KESIMPULAN

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter mempunyai dampak terhadap peredaran uang dalam perekonomian. Dampak tersebut diwujudkan melalui perubahan jumlah uang beredar, suku bunga, kredit, nilai tukar dan berbagai variabel perekonomian lain, serta perekonomian dan keuangan lain. Kebijakan moneter pun

memengaruhi ekspektasi para pelaku ekonomi di pasar uang dan berbagai aktivitas perekonomian, terbukti dengan melemahnya mata uang dunia. Proses tersebut menggambarkan mekanisme yang disebut transmisi kebijakan moneter dalam teori ekonomi moneter (Nugroho dkk., 2020).

Pada prinsipnya tujuan kebijakan moneter Islam dan konvensional adalah sama, yaitu menjaga stabilitas mata uang internal dan eksternal, diversifikasi instrumen keuangan, likuiditas, transparansi sistem keuangan, dan pasar yang efisien untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya jaminan atas nilai nominal, *rate return*, maupun suku bunga. Oleh karena itu, kebijakan moneter secara otomatis menjadi kebijakan moneter Islam dengan tidak menetapkan tingkat suku bunga dalam target operasionalnya. Instrumen ini adalah hukum syariat. Instrumen hukum syariat jelas tidak mencakup unsur-unsur seperti suku bunga bank, tingkat diskonto, operasi pasar terbuka (*open market operation*), dan lain-lain yang ditetapkan dengan sekuritas bunga. Dengan demikian, bank sentral Islam menggunakan instrumen bebas bunga untuk mengendalikan kebijakan ekonomi moneter.

Kebijakan moneter memengaruhi keseimbangan ekonomi lainnya. Dampaknya dimulai pada perubahan jumlah uang beredar dan kemudian memengaruhi harga barang dan jasa. Perubahan harga memengaruhi produksi dan kemudian memengaruhi pendapatan masyarakat. Dampak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter merupakan kebijakan yang penting di samping kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lain (Nugroho dkk., 2020).

Kebijakan sistem pembayaran BI terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta mempercepat transaksi ekonomi dan keuangan digital. Pemerintah harus mencegah inflasi menjadi terlalu tinggi. Sebab, inflasi yang tinggi justru dapat menyebabkan perekonomian terpuruk. Salah satu hal yang perlu diamati dalam pengendalian inflasi adalah jumlah uang beredar yang dapat dikendalikan melalui kebijakan diskonto (Diah Ayu dkk., 2021).

Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai bank Sentral harus mampu menstabilkan nilai rupiah, menjaga kestabilan tingkat inflasi, dan menetapkan suku bunga yang kompetitif agar investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, dengan tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus merumuskan kebijakan peningkatan ekspor untuk meningkatkan cadangan devisa negara. Jika nilai tukar dinilai terlalu tinggi, kebijakan yang diambil bisa berupa penurunan nilai mata uang (*devaluasi*), karena langkah ini akan mengurangi impor. Barang ekspor akan menjadi lebih murah di luar negeri sehingga pada akhirnya meningkatkan jumlah ekspor negara. (Hidayat dan Sulasmiyati, 2015).

Intinya, ekonomi Islam dapat mengalahkan inflasi dengan mengubah perilaku manusia, termasuk perilaku para pemimpin. Menurut Parakkasi (2016), ekonomi syariat berpotensi mengatasi bahkan menghilangkan penggunaan sistem moneter berbasis dinar dan dirham, karena emas dan perak bersifat sangat stabil secara riil dan tidak dapat diproduksi sembarangan. Dinar dan dirham sangat bergantung pada pasokan emas dan perak. Hal ini menjadikan inflasi umumnya tidak menjadi masalah besar dalam Islam karena nilai dinar dan dirham yang stabil serta terbukti Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bambang. 2020. "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19". *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2: 233-247. Diakses melalui <https://www.jurnal.plb.ac.id>.
- Caroline, Diah A. 2021. "Pengaruh Nilai Tukar Rupiah dan Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Periode Tahun 1989-2019". *Jurnal Ecodunamika* 4, no. 1. Diakses melalui <https://ejournal.uksw.edu>.
- Fitria, Tira N. 2016. "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 3: 29-40. Diakses melalui <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.
- Grant, Adam M. dan Sharon K. Parker. 2009. "7 Redesigning Work Design Theories: The Rise of Relational and Proactive Perspectives". *Academy of Management Annals* 3, no. 1: 317-375. Diakses melalui <https://doi.org/10.5465/19416520903047327>.
- Hidayat, Raden R. dan Sri Sulasmiyati. 2015. *Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia* 7.
- Isyunanda, Kristianus P. 2020. "Bank Sentral dan Pandemi Covid-19: Quo Vadis? (Central Bank and Covid-19 Pandemic: Quo Vadis?)". *Mimbar Hukum* 32, no. 3: 461-483. Diakses melalui <https://jurnal.ugm.ac.id>.
- Janwari, Yadi. 2016. *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung, Risdakarya.
- Kezia, C., dkk. 2020. "Analisis Perbedaan Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Bank Sentral Terhadap Inflasi di Indonesia". *e-Journal Perdagangan Industri dan Moneter* 8, no. 2: 99-112. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id>.
- Lestari, Etty P., dkk. 2019. *Kebijakan Target Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter Baru Bank Sentral*. Prosiding Seminar Nasional Universitas Terbuka 2014. Diakses <http://repository.ut.ac.id>.
- Marimin, A., dkk. (2015). "Perkembangan Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 2: 75-87. Diakses melalui <https://www.researchgate.net>.
- Marzuki, Siti N. 2020. "Konsep Uang dan Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam". *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 1, no. 2: 201-216. Diakses melalui <https://jurnal.iain-bone.ac.id>.
- Mulyani, R. 2020. "Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam". *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2: 267-278. Diakses melalui <https://lisyabab-staimas.e-journal.id>.
- Murtadho, Muis. 2016. "Pengaruh Suku Bunga Terhadap Nilai Tukar serta Pengaruhnya Terhadap Indeks Harga Saham (Studi Kasus Indonesia, China, dan Australia)". *E-journal Manajemen KINERJA* 2, no. 2. Diakses melalui <https://jurnal.narotama.ac.id>.
- Noviyanto. 2016. "Mengenal The Federal, Bank Sentral Amerika yang Mempengaruhi Dunia". *Koin Works*. Diakses melalui <https://koinworks.com>.

- Nugroho, Helmi. dkk. 2020. *Pengaruh Sistem Keuangan dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Era Orde Baru dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Parakkasi, Idris. 2018. "Inflasi dalam Perspektif Islam". *Jurnal Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2. Diakses melalui <https://journal.uin-alauddin.ac.id>.
- Putra, M. Umar M. 2015. "Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian SUMATERA UTARA". *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* 5, no. 1: 41-49. Diakses melalui <https://www.neliti.com>.
- Rustandi, Rudi. 2019. *Kebijakan Moneter*. Sumber Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses melalui <https://sumber.belajar.kemdikbud.go.id>.
- Semuel, Hatane. 2003. "Penerapan Total Quality Management Suatu Evaluasi Melalui Karakteristik Kerja (Studi Kasus pada Perusahaan Gula Candi Baru Sidoarjo)". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 1: 72-85. Diakses melalui <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id>.
- Utami, Adya. 2019. "Determinan Jumlah Uang Beredar, Tingkat Bunga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Al-Buhuts* 15, no. 2: 45-64. Diakses melalui <https://doi.org/10.30603/ab.v15i2.1106>.